

Soal UU Omnibus Law, Abdul Mu'ti Minta Semua Elemen Masyarakat Menahan Diri

Rabu, 07-10-2020

MUHAMMADIYAH, JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, sejak awal, Muhammadiyah meminta kepada DPR untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan RUU Omnibus law.

"Selain karena masih dalam masa Covid-19 di dalam RUU juga banyak pasal yang kontroversial. RUU tidak mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat, padahal seharusnya sesuai UU, setiap RUU harus mendapatkan masukan dari masyarakat," jelas Abdul Mu'ti.

Tetapi, DPR jalan terus. UU Omnibus tetap disahkan. Memang usul Muhammadiyah dan beberapa organisasi yang mengelola pendidikan telah diakomodir oleh DPR. Lima UU yang terkait dengan pendidikan sudah dikeluarkan dari Omnibus Cipta Kerja.

"Tetapi masih ada pasal terkait dengan perijinan yang masuk dalam Omnibus Cipta Kerja. Memang soal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena itu, Muhammadiyah akan *wait and see* bagaimana isi Peraturan Pemerintah," tegas Abdul Mu'ti.

Diakhir, Mu'ti mengatakan, sebaiknya semua elemen masyarakat dapat menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik.

"Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU dapat melakukan *judicial review*. Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru," tutup Mu'ti.